



Penyebab Inflasi Nilai (*Grade Inflation*) di Perguruan Tinggi

Brigitha Prizelia Nanga

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: brigithananga@unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 12, 2025

Accepted December 20, 2025

Published January 30, 2026

Kata Kunci:

Inflasi Nilai,
Grade Inflation,
Pendidikan Tinggi



Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab inflasi nilai di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab potensial inflasi nilai dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perguruan tinggi, tenaga pendidik dan jenjang pendidikan sebelum pendidikan tinggi. Pada level perguruan tinggi, faktor pendorong inflasi nilai mencakup a) peningkatan persaingan dan b) marketisasi pendidikan tinggi. Pada level tenaga pendidik, rasionalitas dibalik keputusan untuk melakukan inflasi nilai terdiri dari a) kemurahan hati, b) keamanan pekerjaan, keuntungan finansial dan efisiensi waktu, serta c) rendahnya komitmen terhadap mutu pengajaran dan pembelajaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemurahan hati pendidik dalam memberikan penilaian yang longgar belum tentu merupakan bentuk altruisme pedagogis, tetapi tindakan instrumental yang didasarkan pada kepentingan personal. Selain itu, kurangnya komitmen pengajar terhadap proses pendidikan bisa jadi hanyalah bentuk adaptasi terhadap lingkungan kerja yang tidak memberikan penghargaan yang memadai terhadap kualitas pengajaran. Sementara pada jenjang pendidikan sebelum pendidikan tinggi, praktik inflasi nilai di sekolah berkontribusi pada pembentukan standar kepuasan mahasiswa terhadap nilai yang kemudian dapat mempengaruhi penilaian tenaga pendidik di perguruan tinggi. Upaya pengendalian inflasi nilai di perguruan tinggi yang dapat dilakukan ke depan antara lain berorientasi pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pengawasan, peningkatan penghargaan terhadap tenaga pendidik berdasarkan kualitas mengajar dan berkoordinasi dengan jenjang pendidikan sebelumnya.

Abstract

This article aims to identify and explain the causes of Grade Inflation in higher education. The results indicate that potential causes of Grade Inflation can be seen from three aspects: the university, the teaching staff, and the pre-tertiary education level. At the university level, factors driving Grade Inflation include a) increased competition and b) the marketization of higher education. At the teaching staff level, the rationale behind the decision to engage in Grade Inflation consists of a) generosity, b) job security, financial gain, and time efficiency, and c) low commitment to the quality of teaching and learning. These findings indicate that educators' generosity in providing lenient grading is not necessarily a form of pedagogical altruism, but rather an instrumental action based on personal interests. Furthermore, teachers' lack of commitment to the educational process may simply be a form of adaptation to a work environment that does not adequately reward teaching quality. Meanwhile, at the pre-tertiary education level, the practice of Grade Inflation in schools contributes to the formation of student satisfaction standards regarding grades, which can then influence the assessment of teaching staff in higher education. Efforts to control Grade Inflation in higher education that can be carried out in the future include focusing on the quality of teaching and learning, strengthening supervision, increasing appreciation for teaching staff based on teaching quality and coordinating with previous levels of education.

Keywords: *Grade Inflation, Grade Inflation, Higher Education*

A. Pendahuluan

Masyarakat pada umumnya akan mengasosiasikan istilah inflasi dengan ilmu ekonomi. Dalam berbagai tulisan ekonomi populer, inflasi dipahami sebagai penurunan nilai mata uang yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar (Hansen & Newman, 2023). Konsep ini sendiri memang memiliki akar konseptual yang kuat dalam kajian ekonomi.

Terminologi inflasi yang biasanya berada di narasi ekonomi lambat laun diadopsi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia pendidikan. Kamber (2008) menyampaikan bahwa konsep inflasi nilai (*Grade Inflation*) sudah diperkenalkan oleh seorang reporter New York Times bernama Iver Peterson sejak tahun 1972 melalui tulisannya. Menurut Peterson, frasa inflasi nilai berasal dari seorang sosiolog Harvard bernama David Riesman. Sekalipun demikian, Riesman sendiri sebetulnya tidak pernah mengembangkan terminologi ini ke dalam teori khusus. Dalam artikelnya yang berjudul *The Future of Diversity in a Time of Retrenchment* pada tahun 1975, Riesman sempat menggunakan istilah inflasi nilai sebagai bagian kritiknya terhadap apa yang terjadi di perguruan tinggi. Namun isu ini tidak menjadi fokus utama pembahasan.

Istilah inflasi nilai semakin sering digunakan oleh penulis dari tahun ke tahun dengan fokus yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya seperti Kolevzon (1981) yang berfokus pada penyebab dan solusi inflasi nilai, Krautmann & Sander (1999) yang membahas hubungan antara evaluasi mahasiswa dengan praktik pemberian nilai, Oleinik (2009) yang mengembangkan perspektif teoritis baru tentang inflasi nilai, Heulett (2013) yang mendalami tentang berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan inflasi nilai, dan Baglione et al. (2025) yang menunjukkan inflasi nilai dari sudut pandang mahasiswa.

Riesman (1975) memandang bahwa inflasi nilai ditandai oleh pemberian imbalan yang lebih kepada mahasiswa dalam bentuk peningkatan nilai untuk kinerja yang minim. Definisi lain datang dari Oleinik (2009) yang mengartikan inflasi nilai sebagai pencapaian nilai yang lebih tinggi namun tidak didasarkan pada peningkatan capaian akademik peserta didik. Inflasi nilai dianggapnya berbeda dengan *grade increase* (peningkatan nilai yang benar), *grade compression* (nilai terkumpul di kategori tertentu), dan *grade disparity* (perbedaan nilai mahasiswa karena perbedaan praktik penilaian antar pendidik). Sementara Chowdhury (2018) menyampaikan bahwa inflasi nilai dapat muncul bersamaan dengan kompresi nilai (*grade compression*) karena lebih banyak nilai mahasiswa yang terkumpul di kategori penilaian tertinggi. Sebagai contoh di kondisi tanpa inflasi nilai, mahasiswa dengan kinerja yang sangat baik dihargai nilai 'A+', sedangkan mahasiswa dengan kinerja baik dihargai nilai 'B+'. Perbedaan ini tidak akan terlihat ketika pengajar melakukan inflasi nilai. Nilai antara kedua mahasiswa dengan tingkat kinerja yang berbeda akan disamakan, yaitu sama-sama dinilai A+.

Konsep inflasi nilai di pendidikan dimaknai hampir mirip dengan konsep inflasi di ekonomi. Keduanya sama-sama menekankan pada penurunan nilai, penghargaan ataupun makna atas sesuatu. Hal yang membedakan adalah inflasi nilai di pendidikan mengacu pada pelemahan makna atau penghargaan atas nilai akademik peserta didik karena nilai tinggi semakin mudah diperoleh oleh lebih banyak mahasiswa. Nilai tidak lagi memiliki kekuatan sebagai penanda sekaligus pembeda kapasitas lulusan.

Inflasi nilai di sektor pendidikan telah terjadi di berbagai negara (Jephcote et al., 2021; Radavoi et al., 2025), termasuk Indonesia (Amar & Pratiwi, 2025; Arsyad Arrafii, 2020). Banyak tulisan di media massa sebetulnya sudah menyoroti masalah inflasi nilai di jenjang pendidikan tinggi Indonesia namun beberapa dari para penulis tersebut menggunakan istilah "inflasi IPK (Indeks prestasi kumulatif)" dibanding inflasi nilai. Penggunaan istilah ini secara langsung menunjukkan bahwa inflasi nilai yang dimaksud adalah yang terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, berdasarkan hasil pencarian di google scholar, beberapa naskah penelitian

terlihat berfokus di jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menggunakan istilah lain yang hampir mirip dengan inflasi nilai yaitu “katrol nilai”.

Terlepas dari sudah adanya sorotan media massa, literatur atau kajian ilmiah tentang inflasi nilai di perguruan tinggi sejak lama didominasi literatur berbahasa asing, bahkan banyak dari literatur tersebut ditulis sebelum tahun 2000 seperti Birnbaum dengan artikelnya yang berjudul *Factors Related to University Grade Inflation* yang diterbitkan pada tahun 1977. Hal ini dapat menjadi pertanda bahwa diskursus tentang inflasi nilai sebenarnya telah berkembang meskipun dalam bahasa asing.

Sementara itu, literatur berbahasa Indonesia tentang inflasi nilai di pendidikan masih sangat minim. Termasuk soal hal yang paling fundamental seperti penyebab inflasi nilai di perguruan tinggi yang belum tersedia.

Artikel ini mengisi kekosongan literatur Indonesia yang telah dipaparkan di atas. Artikel ini hadir untuk menawarkan pengetahuan atau informasi fundamental dalam memahami fenomena inflasi nilai di perguruan tinggi, yaitu dengan memahami apa saja penyebab potensial dari fenomena tersebut. Melalui penelitian dengan metode *narrative literature review*, penulis melakukan identifikasi, pemetaan, sintesis dan penjelasan penyebab dari inflasi nilai. Bahasa Indonesia yang digunakan menambah ketersediaan dan kemudahan akses pengetahuan kepada pembaca Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus di dalam negeri tentang inflasi nilai di dunia pendidikan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *narrative literature review*. Sebagaimana yang disampaikan Ferrari (2015), metode *narrative review* bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum temuan dari penelitian terdahulu, menghindari publikasi dan menemukan area studi yang belum diteliti.

Metode ini digunakan karena relevansinya dengan tujuan penelitian yaitu identifikasi, pemetaan, sintesis temuan dan penjelasan tentang penyebab inflasi nilai di perguruan tinggi. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal tentang penyebab inflasi nilai di perguruan tinggi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Realisasi tujuan tersebut dapat tercapai dengan metode *narrative review* karena fleksibilitasnya memungkinkan peneliti untuk memperoleh temuan yang memadai dari sintesis penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun *narrative review* dikenal fleksibel, peneliti tetap memiliki kriteria pemilihan artikel dengan kualitas tertentu.

Peneliti memperoleh literatur secara *snowball* dari satu artikel ke artikel lain yang masih relevan. Setiap artikel melalui proses pemeriksaan sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian. Pemilihan literatur utama berdasarkan pada beberapa kriteria. Pertama, artikel utama adalah artikel yang membahas inflasi nilai yang terjadi di perguruan tinggi, sedangkan artikel pendukung adalah artikel yang membahas inflasi nilai di jenjang pendidikan sebelumnya. Kedua, artikel utama adalah artikel yang dipublikasi di jurnal, sedangkan artikel pendukung adalah artikel yang dipublikasi di media massa. Ketiga, artikel utama adalah artikel yang berbahasa Inggris bukan bahasa asing lainnya untuk keakuratan interpretasi penulis. Keempat, artikel utama memiliki pengaruh signifikan di penelitian tentang inflasi nilai di perguruan tinggi yang terlihat dari jumlah kutipan. Kelima, artikel membahas tentang penyebab inflasi nilai di perguruan tinggi ataupun menjelaskan aspek lain yang masih relevan dengan topik tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Temuan dari literatur terdahulu tentang penyebab potensial inflasi nilai di perguruan tinggi dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek yaitu perguruan tinggi, tenaga pendidik dan jenjang

pendidikan sebelum pendidikan tinggi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan dapat menjelaskan fenomena inflasi nilai yang terus berkembang di perguruan tinggi.

1. Penyebab potensial inflasi nilai dari aspek perguruan tinggi

Keterlibatan perguruan tinggi dalam mendorong praktik inflasi nilai dapat terjadi setidaknya karena dua alasan yaitu 1) kompetisi dan 2) marketisasi perguruan tinggi. Berikut pemaparan dari setiap poin tersebut.

a. Kompetisi antar perguruan tinggi

Kompetisi antar perguruan tinggi terjadi untuk memperoleh berbagai sumber daya (Todd Jewell et al., 2013; Chowdhury, 2018; Hart & Rodgers, 2024). Bentuk sumber daya yang diperebutkan meliputi mahasiswa, staf yang kompeten, pendanaan, hibah penelitian, publikasi ilmiah dan peringkat.

Perguruan tinggi dengan mahasiswa dan staf pengajar yang kompeten dapat menghasilkan artikel yang berkualitas. Hasil produktivitas tersebut memungkinkan perguruan tinggi memperoleh hibah penelitian. Perolehan hibah penelitian dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi sekaligus meningkatkan peringkat dan daya saing perguruan tinggi. Peringkat yang tinggi dapat menarik minat mahasiswa internasional yang kemudian meningkatkan sumber pendanaan perguruan tinggi. Bagi beberapa perguruan tinggi di dunia Barat, mahasiswa asing (mahasiswa internasional) menjadi segmen pasar strategis karena adanya keterbatasan bantuan dana pendidikan dari pemerintah (Hart & Rodgers, 2024).

Perguruan tinggi yang berfokus pada persaingan secara berlebihan dapat melakukan inflasi nilai. Fokus tersebut terlihat ketika perguruan tinggi lebih menekankan pada kuantitas dibandingkan kualitas proses dan luaran akademik. Inflasi nilai adalah salah satu cara untuk memperlihatkan keunggulan juga menarik calon mahasiswa potensial di tengah persaingan antar perguruan tinggi (Hart & Rodgers, 2024). Penjelasan lain datang dari Chowdhury (2018) yang menyampaikan bahwa faktor utama inflasi nilai adalah persaingan yang ketat dalam memperoleh mahasiswa. Mahasiswa yang tidak memperoleh nilai sesuai harapan di suatu perguruan tinggi cenderung akan berpindah ke perguruan tinggi lain yang menawarkan peluang lebih besar untuk memperoleh nilai yang tinggi.

Masih relevan dengan isu kompetisi di atas, Popov & Bernhardt (2013) menunjukkan bahwa kompetisi antar perguruan tinggi berkaitan dengan prospek kerja lulusan. Perguruan tinggi unggulan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan nilai mahasiswa. Hal ini menyebabkan lebih banyak mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi. Pemberian nilai yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang prestisius atau posisi kerja yang bergengsi. Dengan cara demikian, perguruan tinggi berupaya menampilkan keunggulan kompetitif lulusannya untuk dibandingkan dengan lulusan dari perguruan tinggi lain.

b) Marketisasi pendidikan tinggi

Istilah marketisasi mulai populer semenjak liberalisasi pendidikan mulai berkembang sejak tahun 1980-an (Maringe, 2015). Institusi pendidikan tinggi didorong untuk lebih mandiri, otonom dari intervensi pemerintah. Otonomi perguruan tinggi mencakup urusan internal

maupun eksternal seperti keuangan, perekrutan, kepegawaian, infrastruktur, pengajaran, penelitian dan sebagainya. Untuk merealisasikan otonomi ini, perguruan tinggi mulai berorientasi pada mekanisme pasar yang menitikberatkan pada sistem harga dan kompetisi (Zhu & Lou, 2011).

Maringe (2015) menyoroti intensifikasi persaingan untuk sumber daya dan penguatan peran krusial peringkat universitas sebagai pendorong utama marketisasi. Sejalan dengan itu, Guilbault (2016) melihat peningkatan persaingan, penurunan dana dari pemerintah dan peningkatan biaya pendidikan berkontribusi pada perkembangan marketisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, marketisasi pendidikan tinggi tercermin dari menguatnya perspektif ekonomi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang berorientasi pada pasar (*market-driven orientation*). Penerapan *Market-driven orientation* bukan tanpa konsekuensi. Institusi yang berorientasi pada pasar perlu mengalihkan perhatiannya pada pemenuhan kepuasan konsumen (Kotler, dikutip dalam Guilbault, 2016). Terutama di tengah persaingan, mahasiswa memiliki lebih banyak pilihan perguruan tinggi. Sebagai upaya untuk menarik dan mempertahankan mahasiswa, perguruan tinggi perlu berfokus pada kebutuhan konsumen.

Dengan orientasi seperti ini, perguruan tinggi selayaknya perusahaan, hadir untuk kepuasan konsumen (Guilbault, 2016). Di titik ini, perguruan tinggi tidak lagi murni menitikberatkan pada pendidikan. Kehadirannya seperti *private sector* yang mencoba bertahan dan berkembang di tengah persaingan.

Fokus pada konsumen memicu perubahan pendekatan terhadap mahasiswa. Sebagaimana metafora dari Rojstaczer & Healy (2012), "*students were no longer considered acolytes, but consumers of a product*". Mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai pelajar, tetapi konsumen. Pendekatan ini dapat disebut sebagai SAC atau *students as customers* (Bunce dkk, 2016). Sementara perguruan tinggi berperan sebagai penyedia jasa yang selayaknya tampil dengan slogan pemasaran, "*we are here to serve and please customers*" (Chowdhury, 2018). Fenomena neoliberalisme dalam pendidikan tinggi seperti ini sudah terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris (Bunce et al., 2023).

Perubahan pendekatan di atas diperkuat oleh peralihan beban atas biaya pendidikan dari pemerintah ke mahasiswa. Mahasiswa sebagai pembayar jasa memperoleh perlindungan dari hukum konsumen dan peraturan sektoral di bidang pendidikan (Bunce et al., 2023). Ditambah lagi dengan biaya pendidikan yang semakin mahal yang tidak hanya semakin memperkuat keyakinan mahasiswa sebagai konsumen tetapi juga meningkatkan ekspektasi nilai yang memuaskan berdasarkan pandangan subjektif mahasiswa dan orang tua (Cuthbert, 2010). Hal ini menimbulkan tekanan kepada lembaga perguruan tinggi dalam pemberian nilai sesuai ekspektasi tersebut terlepas dari standar akademik (Chowdhury, 2018).

Keberlanjutan dari fokus terhadap kepuasan konsumen, perguruan tinggi menerapkan apa yang disebut sebagai *student evaluations of teaching* (SET) atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai evaluasi pengajaran oleh mahasiswa. Pada dasarnya, SET bertujuan untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap pengajar dan pengalaman perkuliahan. Menurut Rojstaczer & Healy (2012), survei penilaian mahasiswa diimplementasikan secara masif pada tahun 1980-an dan 1990-an. Evaluasi ini menjadi lebih krusial karena tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kualitas pengajaran tetapi juga menjadi penentu nasib pendidik seperti keputusan perihal gaji, promosi maupun keberlanjutan masa kerja. Tekanan yang besar dari evaluasi penilaian mahasiswa tersebut disinyalir memicu praktik inflasi nilai.

Penerapan SET tidak terlepas dari kritik. Stroebe (2020) menyampaikan bahwa SET bukanlah ukuran yang valid untuk menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran mahasiswa. SET lebih mencerminkan kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan subjektif yang tidak relevan dengan proses pendidikan. Terlebih lagi SET ini mempengaruhi pengambilan keputusan pimpinan perguruan tinggi dalam hal perekrutan, promosi maupun kenaikan gaji dari para tenaga pendidik. Posisi SET sebagai penentu nasib pendidik tersebut dapat berdampak pada pengajaran yang buruk dan inflasi nilai. Dengan mekanisme yang demikian, hasil evaluasi pengajaran yang bagus, bisa jadi sebenarnya merupakan pengajaran yang buruk, sedangkan hasil evaluasi pengajaran yang buruk, bisa jadi sebenarnya merupakan pengajaran yang baik. Berdasarkan problematika SET itu, Stroebe (2020) menyarankan agar pimpinan perguruan tinggi seperti dekan atau kepala departemen untuk menggunakan sumber informasi lain untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendikinya.

Pandangan kritis lainnya tentang dampak negatif dari penerapan SAC dan SET dapat dilihat dalam tulisan Bunce et al. (2016). Bunce et al. (2016) memaparkan tentang kecenderungan mahasiswa yang tidak lagi memilih untuk menjadi seorang pembelajar (*learner*). Mahasiswa cenderung tidak lagi berorientasi pada proses pertumbuhan dan perkembangan intelektual, tetapi pada perolehan gelar semata dan pekerjaan yang bergaji tinggi. Di benak mahasiswa, terdapat ekspektasi untuk “dilayani” bukan “ditantang”, yang dalam konteks ini bermakna sebagai tantangan dalam proses belajar. Mahasiswa yang tidak puas dengan “pelayanan” (nilai dari staf pengajar) akan memberikan evaluasi yang buruk. Untuk menghindari hal tersebut, pengajar akan menyederhanakan penilaian dan meningkatkan nilai untuk mencegah risiko adanya keluhan sekaligus pula untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa.

2. Penyebab potensial inflasi nilai dari aspek tenaga pendidik

Tenaga pendidik yang berada di ujung tombak proses pedagogis merupakan aktor terdepan dalam praktik inflasi nilai. Kajian literatur menunjukkan bahwa rasionalitas pendidik dibalik inflasi nilai didasari oleh tiga hal, antara lain a) kemurahan hati, b) keamanan pekerjaan, keuntungan finansial dan efisiensi waktu, serta c) rendahnya komitmen terhadap mutu pengajaran dan pembelajaran.

Rasionalitas untuk inflasi nilai memperlihatkan bahwa pendidik tidak hanya semata-mata “tunduk” atau menjadi “korban” dari tekanan struktur dan kepentingan yang beroperasi di tingkat perguruan tinggi, tetapi juga aktor rasional yang memiliki ruang untuk menentukan pilihan, melakukan pertimbangan dan memilih alasan atas tindakannya. Dengan demikian, pendidik dipandang tidak sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab atas keputusan melakukan inflasi nilai. Selain itu, tindakan inflasi nilai tidak murni sebagai perbuatan altruisme pendidik kepada mahasiswa, tetapi tindakan yang mengandung unsur kepentingan pribadi. Hal tersebut terlihat dari tiga dimensi rasionalitas pendidik untuk terlibat dalam praktik inflasi nilai yang dipaparkan di bawah ini.

a. Kemurahan Hati

Inflasi nilai dapat memanifestasikan kemurahan hati pendidik terhadap mahasiswanya. Kemurahan hati ini didasarkan oleh rasa kasih sayang atau bentuk kepedulian terhadap masa depan (prospek kerja atau peluang beasiswa) dan kesejahteraan psikologi mahasiswa (misalnya biar mahasiswa tidak merasa gagal, rendah diri dan memiliki semangat belajar) (Giray, 2024;

Chowdhury, 2018). Pendidik yang murah hati melonggarkan atau menurunkan standar penilaian sehingga mahasiswa memperoleh nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya sekalipun mahasiswa tersebut tidak mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan atau persyaratan minimum untuk suatu pembelajaran (Giray, 2024; Chowdhury, 2018).

Giray (2024) berpendapat bahwa alasan inflasi nilai didasarkan pada rasa empati bukanlah sesuatu yang jahat. Namun, penulis tersebut mengingatkan bahwa kemudahan pemberian nilai berdasarkan perasaan seperti ini perlu dipertimbangkan kembali terutama tentang ketepatan cara dari niatan baik tersebut. Sebagai contoh kemungkinan munculnya ketidakadilan sebagai konsekuensi negatif dari inflasi nilai.

b. Keamanan Pekerjaan, Keuntungan Finansial dan Efisiensi Waktu

Kepentingan personal seperti keamanan pekerjaan dan keuntungan finansial dapat menjadi pemicu tenaga pendidik untuk melakukan inflasi nilai. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, evaluasi mahasiswa menentukan nasib pendidik dari aspek gaji, promosi maupun perpanjangan kontrak kerja. Pendidik melonggarkan penilaian dan meningkatkan nilai untuk terhindar dari risiko-risiko tersebut. Terutama bagi staf pengajar tidak tetap yang bergantung pada hasil evaluasi yang tinggi untuk kepastian status sebagai pengajar tetap atau peluang promosi (Yeristyan et al., 2022; Rojstaczer & Healy, 2012; Todd Jewell et al., 2013; Giray, 2024).

Alasan lainnya bagi pendidik untuk melakukan inflasi nilai adalah efisiensi waktu. Pendidik perlu meluangkan waktu yang bisa berlangsung selama berjam-jam untuk merespons pengaduan mahasiswa tentang nilai. Oleh sebab itu, pendidik memberikan nilai tinggi untuk menghindari situasi seperti ini terjadi (Chowdhury, 2018). Hasil riset terbaru dari Radavoi et al. (2025) masih menunjukkan hal yang sama.

Banyak bukti yang mengindikasikan bahwa nilai yang tinggi menghasilkan evaluasi mahasiswa yang lebih positif (Rojstaczer & Healy, 2012). Sekilas inflasi nilai seperti menciptakan *a win-win situation* atau situasi ketika kepentingan semua pihak baik pendidik maupun mahasiswa terpenuhi. Kondisi ini sebetulnya secara implisit mengandung unsur transaksional. Staf pengajar “membeli” evaluasi yang positif dan menghindari kerugian dari segi waktu dengan menurunkan standar penilaian. Anak didik memberikan evaluasi yang positif sebagai rasa terima kasih atau bentuk kepuasan terhadap nilai yang tinggi. Pendidik senang dengan evaluasi yang tinggi dan tidak adanya gangguan dari pengaduan. Mahasiswa senang dengan nilai yang tinggi. Pimpinan atau lembaga perguruan tinggi pun senang dengan prestasi nilai mahasiswanya. Semua pihak berkepentingan senang hanya dengan mudah menambahkan beberapa angka ke dalam lembaran nilai mahasiswa. Meskipun begitu, Krautmann & Sander (1999) mengingatkan “sisi gelap” dari inflasi nilai yang dapat mencederai dunia pendidikan seperti berkurangnya etos belajar mahasiswa.

c. Rendahnya Komitmen terhadap Mutu Pengajaran dan Pembelajaran

Di beberapa kasus, pendidik terlihat tidak menunjukkan upaya yang memadai selama perkuliahan. Misalnya tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengajar. Masalah ini dapat muncul dari staf pengajar yang sedang menempuh pendidikan lanjutan (doktoral) atau memiliki lebih dari satu pekerjaan. Para pendidik ini memiliki pekerjaan atau tanggung jawab lainnya yang memecah fokus sehingga kesulitan untuk tampil profesional selama perkuliahan. Sebagai contoh, pendidik yang hanya membaca informasi dari hasil pencarian di *google* (Giray,

2024). Giray (2024) berpendapat bahwa perilaku tidak profesional dari pendidik juga dapat disebabkan oleh sifat bawaan individu tersebut yaitu kemalasan. Kemalasan ini berkaitan dengan mentalitas bahwa jumlah gaji yang diperoleh pada akhirnya akan sama saja antara pengajar yang rajin dan tidak rajin.

Rendahnya komitmen pendidik tidak hanya berkaitan dengan beban kerja dan rasa malas, tetapi juga ketidakpedulian. Ketidakpedulian atau acuh tak acuh ini menyebabkan pengajar tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik. Beberapa contoh perilaku yang ditunjukkan antara lain pemberian nilai yang sama kepada mahasiswa, pengurangan waktu perkuliahan sebanyak lebih dari 50% waktu yang sebenarnya dijadwalkan, fokus pada keuntungan finansial seperti meminta mahasiswa membeli buku yang ditulis pengajar tersebut dan tidak mengajar secara rutin. Ada pula staf pengajar yang mendelegasikan tanggung jawab pengajaran kepada mahasiswa seperti dengan memberikan tugas berupa laporan dan tugas administrasi seperti membuat penilaian dan memasukkan nilai. Kelemahan kinerja dari sisi pendidik di atas kemudian ditutupi dengan meningkatkan nilai mahasiswa terlepas dari pencapaian pembelajaran yang sebenarnya (Giray, 2024).

Sehubungan dengan temuan di atas, indikasi “kemalasan dan ketidakpedulian pedagogis” dari staf pengajar memang perlu dihiraukan, meskipun begitu faktor struktural seperti pengawasan dan penghargaan terhadap kualitas pengajaran dan pembelajaran perlu diperhatikan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya terlihat bahwa kemungkinan prioritas perguruan tinggi adalah pada *output* berbentuk numerik yaitu angka nilai dari mahasiswa. Jika semua mahasiswa lulus dan bernilai tinggi maka pengajaran dan pembelajaran itu sudah dianggap berkualitas.

Hal di atas dapat mengurangi apresiasi pimpinan atau lembaga perguruan tinggi terhadap kualitas pengajaran yang kemudian mempengaruhi motivasi para pengajar untuk menjalankan tugas pendidikan secara profesional. Pengajar yang menunjukkan *effort* tinggi dan *minimum effort* akan dianggap sama saja. Pengajar yang berupaya untuk bekerja secara profesional seperti mempersiapkan diri dengan baik untuk perkuliahan, secara rutin mengajar, benar-benar hadir ketika berada di kelas bersama dengan mahasiswa, menilai mahasiswa secara objektif sesuai kinerja selama perkuliahan, tidak akan ada perbedaan baik dari segi penghargaan maupun gaji dengan pengajar yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, hanya menyerahkan proses belajar mengajar di kelas kepada mahasiswa misalnya dengan membuat makalah dan presentasi, jarang mengajar, dan menilai mahasiswa berdasarkan kriteria yang tidak jelas atau tidak relevan atau bahkan hanya menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada mahasiswa. Dalam situasi seperti ini, kerja minimalis dan melakukan inflasi nilai untuk menutupi kelemahan tersebut dapat menjadi pilihan yang masuk akal bagi pendidik. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai “kemalasan dan ketidakpedulian pedagogis” dari pendidik bisa saja hanyalah bentuk adaptasi terhadap lingkungan kerja tanpa penghargaan proporsional terhadap kualitas pengajaran.

3. Penyebab potensial inflasi nilai dari aspek jenjang pendidikan sebelumnya

Pendidikan perlu dilihat sebagai sebuah sistem. Luaran dari jenjang pendidikan yang satu akan mempengaruhi jenjang pendidikan selanjutnya. Inflasi nilai yang terjadi di perguruan tinggi bisa jadi dipengaruhi oleh inflasi nilai yang sudah berkembang di jenjang pendidikan sebelumnya.

Inflasi nilai di jenjang pendidikan sebelumnya membentuk ekspektasi atau standar kepuasan mahasiswa terhadap nilai. Misalnya, para siswa yang tidak pernah memperoleh nilai C dan jarang memperoleh nilai B di sekolah dapat mengasumsikan nilai C sebagai tanda kegagalan, sedangkan nilai B sebagai nilai minimum. Ketika berada di perguruan tinggi, persepsi atas nilai tersebut dibaca oleh staf pengajar yang berada dalam tekanan dari institusi ataupun memiliki kepentingan personal lainnya. Selanjutnya, pendidik menyesuaikan nilai sesuai standar kepuasan mahasiswa tersebut (Rojstaczer & Healy, 2012).

D. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa inflasi nilai menghasilkan nilai tinggi yang bersifat artifisial (*artificially high grade*) yang tidak merepresentasikan kualitas kinerja atau peningkatan kepintaran mahasiswa. Hal ini diperkuat oleh kajian literatur terdahulu yang menunjukkan bahwa penyebab inflasi nilai di perguruan tinggi terkait dengan tiga aspek yaitu perguruan tinggi, tenaga pendidik dan jenjang pendidikan sebelum perguruan tinggi.

Dari aspek institusi perguruan tinggi terdapat dua penyebab potensial dari inflasi nilai yaitu a) peningkatan persaingan antar perguruan tinggi dan b) marketisasi pendidikan tinggi. Dari aspek pendidik, faktor-faktor seperti a) kemurahan hati, b) keamanan pekerjaan, keuntungan finansial dan efisiensi waktu, serta c) rendahnya komitmen terhadap mutu pengajaran dan pembelajaran, menjelaskan rasionalitas pendidik terhadap inflasi nilai. Dari aspek jenjang pendidikan sebelum perguruan tinggi, kebiasaan inflasi nilai di sekolah membentuk standar kepuasan mahasiswa terhadap nilai yang dapat mempengaruhi penilaian pengajar di perguruan tinggi.

Berdasarkan temuan di atas, aspek struktural yaitu peran pimpinan atau lembaga perguruan tinggi tetap menjadi faktor krusial untuk pengendalian fenomena inflasi nilai. Pihak terkait perlu meningkatkan perhatian pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, memperkuat pengawasan dan meningkatkan penghargaan terhadap pendidik berdasarkan kinerja mengajar. Selain itu, koordinasi dengan stakeholders di jenjang pendidikan sebelumnya juga perlu dilakukan untuk membentuk ekspektasi mahasiswa terhadap nilai yang pantas sesuai dengan prestasinya. Berbagai upaya ke depan tentu dapat menjadi “pekerjaan rumah” bagi institusi perguruan tinggi terutama untuk memikirkan bagaimana caranya bertahan dan berkembang dalam kompetisi tanpa mengorbankan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

E. Daftar Pustaka

- Amar, M., & Pratiwi, I. (2025). Ramai soal Inflasi IPK di Indonesia, Apa Penyebabnya? <https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/25/133000165/Ramai-Soal-Inflasi-Ipk-Di-Indonesia-Apa-Penyebabnya-?Page=all>
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/25/133000165/ramai-soal-inflasi-ipk-di-indonesia-apa-penyebabnya-?page=all>
- Arsyad Arrafii, M. (2020). Grades and *Grade Inflation*: exploring teachers' grading practices in Indonesian EFL secondary school classrooms. *Pedagogy, Culture and Society*, 28(3), 477–499. <https://doi.org/10.1080/14681366.2019.1663246>
- Baglione, S. L., Smith, Z., & Roach, O. (2025). *Grade Inflation*: graduate students' perspective. *Educational Research and Evaluation*, 30(1–2), 115–136. <https://doi.org/10.1080/13803611.2024.2422617>
- Birnbaum, R. (1977). Factors Related to University *Grade Inflation*. *The Journal of Higher Education*, 48(5), 519. <https://doi.org/10.2307/1981595>

- Bunce, L. T., Rathbone, C., & King, N. (2023). Students as consumers. *Advancing Student Engagement in Higher Education*, 71–81. <https://doi.org/10.4324/9781003271789-7>
- Chowdhury, F. (2018). *Grade Inflation: Causes, Consequences and Cure*. *Journal of Education and Learning*, 7(6), p86. <https://doi.org/10.5539/jel.v7n6p86>
- Cuthbert, R. (2010). Students as Customers?. *Higher Education Review*, 42(3), 3–25.
- Ferrari, R. (2015). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615z.000000000329>
- Giray, L. (2024). Instructor-Driven Causes and Impacts of *Grade Inflation* in Philippine Higher Education. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.30997/ijrs.v6i1.383>
- Guilbault, M. (2016). Students as customers in higher education: reframing the debate. *Journal of Marketing for Higher Education*, 26(2), 132–142. <https://doi.org/10.1080/08841241.2016.1245234>
- Hansen, K. J. M., & Newman, J. R. (2023). What Is Inflation? Clarifying and Justifying Rothbard's Definition. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 25(4), 147–170. <https://doi.org/10.35297/qjae.010141>
- Hart, P. F., & Rodgers, W. (2024). Competition, competitiveness, and competitive advantage in higher education institutions: a systematic literature review. *Studies in Higher Education*, 49(11), 2153–2177. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2293926>
- Heulett, S. T. (2013). Factors Related to the Likelihood of *Grade Inflation* at Community Colleges. ProQuest LLC.
- Jephcote, C., Medland, E., & Lygo-Baker, S. (2021). *Grade Inflation* versus grade improvement: Are our students getting more intelligent? *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 46(4), 547–571. <https://doi.org/10.1080/02602938.2020.1795617>
- Kamber, R. (2008). Understanding *Grade Inflation*. In L. H. Hunt (Ed.), *Grade Inflation: Academic standards in higher education*. Albany, NY: SUNY Press.
- Kolevzon, M. S. (1981). *Grade Inflation* in higher education: A comparative study. *Research in Higher Education*, 15(3), 195–212. <https://doi.org/10.1007/BF00976416>
- Krautmann, A. C., & Sander, W. (1999). Grades and student evaluations of teachers. *Economics of Education Review*, 18(1), 59–63. [https://doi.org/10.1016/s0272-7757\(98\)00004-1](https://doi.org/10.1016/s0272-7757(98)00004-1)
- Maringe, F. (2015). Higher Education Market. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 850–861. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92118-4>
- Oleinik, A. (2009). Does education corrupt? Theories of *Grade Inflation*. *Educational Research Review*, 4(2), 156–164. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2009.03.001>
- Popov, S. V., & Bernhardt, D. (2013). University competition, grading standards, and *Grade Inflation*. *Economic Inquiry*, 51(3), 1764–1778. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2012.00491.x>
- Radavoi, C. N., Quadrelli, C., & Collins, P. (2025). Moral Responsibility for *Grade Inflation*: Where Does It Lie? *Journal of Academic Ethics* 2025 23:4, 23(4), 1781–1798. <https://doi.org/10.1007/s10805-025-09627-x>
- Riesman, D. (1975). The future of diversity in a time of retrenchment. *Higher Education*, 4(4), 461–482. <https://doi.org/10.1007/BF00154470>
- Rojstaczer, S., & Healy, C. (2012). Where a is ordinary: The evolution of american college and university grading, 1940-2009. *Teachers College Record*, 114(7). <https://doi.org/10.1177/016146811211400707>

- Stroebe, W. (2020). Student Evaluations of Teaching Encourages Poor Teaching and Contributes to *Grade Inflation*: A Theoretical and Empirical Analysis. *Basic and Applied Social Psychology*, 42(4), 276–294. <https://doi.org/10.1080/01973533.2020.1756817>
- Todd Jewell, R., McPherson, M. A., & Tieslau, M. A. (2013). Whose fault is it? Assigning blame for *Grade Inflation* in higher education. *Applied Economics*, 45(9), 1185–1200. <https://doi.org/10.1080/00036846.2011.621884>
- Yeritsyan, A., Mjelde, J. W., & Litzenberg, K. K. (2022). *Grade Inflation* or Grade Increase. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 54(2), 375–393. <https://doi.org/10.1017/aae.2022.15>
- Zhu, H., & Lou, S. (2011). Marketization of higher education. *Development and Reform of Higher Education in China*, 67–102. <https://doi.org/10.1016/b978-1-84334-639-5.50004-8>.